

Otonomi Daerah dan Konflik Sosial di NTB

A.A. Ngr. Anom Kumbara
(Universitas Udayana)

Pendahuluan

Sudah diketahui secara luas bahwa Indonesia adalah satu Negara di dunia yang paling majemuk baik dari segi etnis, kebudayaan, agama maupun adat istiadatnya. Kemajemukan itu di samping menjadi salah satu kebanggaan bangsa yang direfleksikan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika, di sisi lain juga mempunyai potensi-potensi konflik yang tak sedikit jumlahnya, yang dapat menggoyahkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa. Potensi-potensi konflik tersebut dapat berwujud sebagai konflik-konflik antar individu. Konflik-konflik antar individu dapat meledak menjadi konflik sosial yang luas ketika konflik tersebut telah mengarah dan dirasakan sebagai suatu tindakan penindasan, ketidakadilan yang menyangkut berbagai kepentingan (jati diri, kehormatan dan kerugian material) yang dialami oleh warga suku bangsa tersebut.

Memang melalui strategi politik dan kebijakan yang bersifat represif, dan sentralistik, yang diterapkan oleh

pemerintah baik masa pemerintahan Soeharto, untuk sementara waktu potensi konflik tersebut dapat diredam. Namun demikian, berbagai krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia (krisis ekonomi yang berkepanjangan, krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, krisis moral), dan ketimpangan sosial sebagai akibat dari kebijakan model pembangunan yang bersifat *top down* menjadi salah satu faktor pemicu, terjadinya konflik-konflik sosial diberbagai daerah. Sejumlah peristiwa penting yang dapat dicatat antara lain peristiwa Situbondo di penghujung 1996, Tasikmalaya akhir 1996, Sanggulondo dan Rengasdengklok pada awal 1997 dan Ujung Pandang pada bulan September 1997. Hampir dalam semua kasus yang terjadi ada perpaduan yang kuat antara dimensi etnik, agama dan ekonomi, dimana yang menjadi sasaran utama cenderung diarahkan pada kelompok-kelompok minoritas (Cina dan non Muslim).

Demikian juga kerusuhan sosial yang terjadi di kota Mataram pada tanggal 17 Januari 2000 dan kerusuhan Sumbawa pada tahun 1980 menunjukkan pola kelompok konflik yang sama yakni melibatkan mayoritas dan minoritas (penduduk asli yang Islam dengan pendatang yang non Islam atau antara orang Sasak dan Sumbawa dengan orang Bali dan Cina) dan pada gilirannya kelompok minoritas selalu menjadi sasaran kerusuhan.

Faktor-faktor yang diduga penyebab kerusuhan adalah faktor, kesenjangan ekonomi, faktor budaya, pertarungan elit lokal di pemerintahan, dan faktor sentimen etnis dan keagamaan berkenaan kerusuhan Ambon.

Berkenaan dengan konflik sosial Mataram, dan kerusuhan Sumbawa pada tahun sebelumnya, maka tulisan ini ingin mengungkapkan akar masalah konflik sosial yang terjadi di NTB dikaitkan dengan penerapan UU otonomi daerah dan sekaligus mencari solusi pemecahannya.

Etnisitas dan konflik sosial

Kelompok etnis dan etnisitas

Istilah kelompok etnis menurut (Narrol 1996) pada umumnya dipahami sebagai suatu populasi orang atau penduduk yang mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

1. Secara biologis mampu berkembang baik dan bertahan,
2. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam satu bentuk budaya,
3. Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan
4. Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Frederik Barth (1988: 11-12) kurang setuju terhadap cara merumuskan definisi ini, tapi bukan pada substansinya. Rumusan tersebut tidak jauh berbeda dengan yang umum dikenal yaitu, bahwa suku bangsa = bangsa = bahasa; sedangkan masyarakat = suatu unit yang hidup terpisah dari unit lain. Menurut Barth keputusan demikian tidak memungkinkan teramatinya fenomena-fenomena kelompok

etnik secara menyeluruh serta posisi mereka dalam kehidupan masyarakat dan budaya, dalam konteks historis, fungsi dan struktur dari kelompok etnis tersebut. Dengan demikian dua hal pokok yang dapat dibahas dalam mengamati kehadiran kelompok-kelompok etnis dengan ciri-ciri unit budayanya yang khusus, yaitu: (1) kelanggengan unit budaya ini, dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi unit budaya tersebut. Dan hal pokok yang dapat ditemukan dalam kelompok etnis yang dapat diidentikkan sebagai suku bangsa yakni, suatu kelompok etnis yang memiliki ciri dan kebersamaan secara intern dan perbedaan secara ekstern dengan kelompok lain, tidak saja karena ia memiliki nilai budaya, tetapi juga bahasa yang khas yang menjadi identitas kelompoknya.

Sedangkan istilah etnisitas mengacu pada masalah perasaan bersama atau senasib-sepenanggungan kelompok etnis. Tumbuhnya perasaan yang demikian merupakan sebuah produk dari sejarah dan asal usul yang diwarisi (Isaacs 1993:50). Dalam pengertian yang lebih umum istilah etnisitas juga menunjuk keseluruhan aspek tentang masalah-masalah etnis (Akil 1994:184).

Keseluruhan aspek tentang masalah-masalah etnis yang dimaksud sering mengacu bukan hanya pada hal-hal yang bersifat biologis, tetapi juga pada aspek non fisik seperti: kepercayaan, pengetahuan budaya, agama, bahasa dan adat-istiadat yang diwarisinya. Warisan kebudayaan yang diyakini kebenarannya itu, digunakan untuk melihat diri mereka dan melihat warga suku bangsa lain. Dengan mengacu pada kebudayaannya, warga suku bangsa mengembangkan stereotip dan prasangka mengenai suku-suku bangsa lain yang ada dalam kehidupan mereka. Melalui stereotip dan prasangka ini, batas-batas sosial dan budaya yang tergolong ke dalam suku bangsa mereka, ataupun yang tergolong dalam golongan sosial lainnya, dapat menjadi jelas (Suparlan 1991 :6).

Konflik sosial

Kerjasama, konflik dan akomodasi merupakan tiga kemungkinan yang tidak terhindarkan dalam setiap hubungan antar kelompok.

Menurut Dahrendorf (1959) konflik merupakan sesuatu yang endemik, atau yang selalu ada dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Menurut Cosers (1956) konflik adalah perjuangan individu atau kelompok untuk memenangkan suatu tujuan, dan sekaligus menetralkan, menghancurkan atau menghilangkan rivalnya (Horowitz 1985). Sumber utama terjadinya konflik adalah adanya upaya-upaya individu atau kelompok untuk mendapatkan sumber-daya yang terbatas bagi kebutuhan dan keinginan mereka. Karena sumber-sumber daya ini, dalam kadar tertentu selalu terbatas, maka konflik untuk mendapatkannya selalu terjadi.

Menurut Marx, dalam masyarakat yang telah terbagi berdasarkan kelas, kelas sosial yang memiliki kekuatan-kekuatan produksi dapat mensubordinasi kelas sosial yang

lain dan memaksa kelompok tersebut bekerja untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Jadi kelas dominan menjalin hubungan dengan kelas yang tersubordinasi dalam sebuah proses eksploitasi ekonomi. Sebaliknya, secara alamiah kelas-kelas yang tersubordinasi akan marah karena dieksploitasi dan terdorong untuk memberontak terhadap kelas dominan, serta berupaya menghapuskan hak-hak istimewa mereka. Demikian juga kelas dominan akan berusaha untuk mempertahankan dominasinya dengan menciptakan sistem politik yang kuat.

Dalam menganalisis pertentangan kelas yang terjadi dalam masyarakat Marx bersandarkan pada hipotesis teori sebagai berikut: (1) kehidupan sosial pada dasarnya merupakan arena konflik atau persaingan di antara dan di dalam kelompok-kelompok yang bertentangan, (2) sumber-sumber daya ekonomi dan politik merupakan hal yang penting yang berusaha direbut oleh berbagai kelompok, (3) akibat tipikal dari pertentangan ini adalah pembagian masyarakat menjadi kelompok yang determinan secara ekonomi dan kelompok yang tersubordinasi, (4) pola-pola dasar suatu masyarakat sangat ditentukan oleh pengaruh sosial dari kelompok yang secara ekonomi merupakan kelompok yang determinan, (5) konflik dan pertentangan di dalam dan di antara berbagai masyarakat melahirkan kekuatan-kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial, dan (6) karena konflik sosial merupakan ciri dasar kehidupan sosial, maka perubahan sosial menjadi hal yang umum dan sering terjadi (Sanderson 1993: 11).

Berbeda dengan Marx, Weber percaya bahwa konflik terjadi dengan cara yang jauh lebih luas dari sekedar kondisi-kondisi material dasar (Collins 1985). Weber mengakui bahwa konflik dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi merupakan ciri dasar kehidupan sosial, tetapi dia berpendapat bahwa banyak tipe-tipe konflik lain juga terjadi. Dua tipe yang menjadi titik perhatian Weber adalah, bahwa konflik dalam arena politik sebagai sesuatu yang sangat fundamental. Baginya, kehidupan sosial dalam kadar tertentu merupakan pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan dominasi oleh sebagian individu dan kelompok tertentu terhadap yang lain. Dan dia tidak menganggap pertentangan untuk memperoleh kekuasaan ini hanya didorong oleh keinginan memperoleh keuntungan ekonomi. Sebaliknya dia melihat, dalam kadar tertentu sebagai tujuan pertentangan itu sendiri (Sanderson 1993,11-12). Weber berpendapat bahwa pertentangan untuk memperoleh kekuasaan tidak terbatas hanya pada organisasi organisasi politik formal, tetapi juga terjadi dalam setiap tipe kelompok seperti, organisasi keagamaan, organisasi kelompok etnis, pendidikan, dll.

Tipe konflik kedua yang sering kali ditekankan Weber adalah konflik dalam hal gagasan dan cita-cita. Dia berpendapat bahwa orang sering kali tertantang untuk memperoleh dominasi dalam hal pandangan dunia mereka, baik itu berupa doktrin keagamaan, filsafat sosial ataupun konsepsi tentang gaya hidup, atau perilaku kultural yang

dianggap benar, sesuai dan terbaik. Lebih dari itu, gagasan dan cita-cita tersebut bukan hanya dipertentangkan, tetapi sering dijadikan senjata atau instrumen dalam pertentangan lainnya, misalnya pertentangan politik. Jadi orang dapat berkelahi untuk memperoleh kekuasaan, dan pada saat yang sama berusaha saling meyakinkan satu sama lain, bahwa bukan kekuasaan itu yang mereka tuju, tetapi kemenangan prinsip-prinsip yang secara etis dan filosofis benar.

Menurut Marx cara memecahkan konflik dasar dalam masyarakat di masa depan adalah dengan mengembalikan akses kekuatan-kekuatan produksi kepada kontrol seluruh masyarakat. Sebaliknya Weber berpandangan bahwa pertentangan merupakan salah satu prinsip kehidupan sosial yang sangat kukuh dan tak dapat dihilangkan. Dalam suatu tipe masyarakat apapun di masa depan, orang-orang akan tetap selalu bertarung memperebutkan berbagai sumberdaya, walaupun mengambil bentuk-bentuk dan tingkat kekerasan yang secara substansial sangat bervariasi.

Mengambil alur berfikir Weber di atas, dikaitkan dengan kondisi riil masyarakat Indonesia yang majemuk atau multietnis, maka dapat diprediksi bahwa konflik - konflik sosial potensial untuk terjadi di berbagai daerah secara berulang, dengan mengambil modus dan pola yang relatif sama.

Otonomi daerah

Gelombang reformasi yang baru saja melanda Indonesia, selain membawa perubahan pada tata kehidupan politik dan ketatanegaraan sebagai negara kesatuan, juga menyuburkan peristiwa-peristiwa politik yang mengarah pada disintegrasi dan gerakan-gerakan separatisme. Selain itu krisis berkepanjangan yang multidimensional dan adanya pertarungan elit-elit politik baik di tingkat pusat maupun di daerah telah memperburuk keadaan dan menjadikan kondisi bangsa semakin terpuruk. Meski diakui banyak pengamat, bahwa munculnya konflik-konflik sosial dan disintegrasi bangsa, selain sebagai dampak ikutan dari reformasi, beberapa diantaranya adalah akibat dari akumulasi berbagai kekeewaan masyarakat terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah selama 32 tahun pemerintahan rezim Soeharto.

Dampak ikutan dari reformasi lebih disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah Orda Baru yang terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi tanpa basis yang kuat, dengan model kebijakan yang bersifat *top down* dan sentralistik. Implikasi dari penerapan model tersebut terhadap tatanan sosial budaya masyarakat antara lain: mudarnya peranan elit-elit lokal yang sebelumnya menjadi panutan; hilangnya atau kurang efektifnya fungsi pranata-pranata lokal yang dulunya sangat fungsional bagi kehidupan masyarakat; hilangnya gairah inovatif dan inisiatif di kalangan rakyat; mudarnya sikap saling percaya dan toleransi yang berbeda latar sosial budayanya, akibat dari perlakuan yang diskriminatif dan tindakan represif terhadap isu-isu SARA.

Adanya praktek ketidakadilan dalam berbagai aspek

kehidupan berbangsa dan bernegara (dalam bidang ekonomi, politik, agama, sejarah dan etnik) terakumulasi secara komprehensif melahirkan gerakan-gerakan daerah untuk melepaskan diri dari negara kesatuan. Maka lahirlah apa yang dinamakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Negara Papua Merdeka, Riau Merdeka, dan Gerakan Negara Indonesia Timur.

Bersamaan dengan gelombang reformasi, bergulirnya wacana otonomi daerah ke masyarakat NTB, mendapat respons yang positif dan luas dari masyarakat Sasak baik dari kalangan birokrasi maupun masyarakat biasa. Otonomi daerah yang dimaksudkan untuk memberikan kewenangan otonom kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat, yang berlandaskan pada azas demokrasi, transparansi dan keadilan dan tanggung jawab, membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat.

Dampak positif dari respon masyarakat Sasak terhadap wacana otonomi daerah antara lain: (1) tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi masalah-masalah riil yang dihadapi seperti : masalah keamanan, kesehatan lingkungan, kemiskinan dan masalah adat dan agama, (2) Tumbuh suburnya kelompok organisasi baru baik yang bergerak dalam bidang agama, sosial kemasyarakatan, maupun politik terutama dalam rangka suksesi kepemimpinan daerah, yang terhimpun dalam wadah Ormas Pam Swakarsa, (3) Tumbuh dan berkembangnya kesadaran eksistensi diri sebagai warga suku Sasak yang bertanggungjawab terhadap keberhasilan pembangunan daerah dengan mengacu pada ediom tradisional yaitu : Patuh, Patut dan Pacu (PPP), (4) Munculnya kembali pengaruh dan peran-peran tokoh tradisional (Tuan Guru) dalam kehidupan sosial politik di daerah, dan (5) Munculnya dan upaya-upaya untuk membangun kembali pranata-pranata sosial yang dianggap fungsional bagi kepentingannya.

Dampak negatifnya antara lain: (1) berkembangnya kesadaran dan sentimen kedaerahan secara berlebihan (primordialisme) di kalangan masyarakat, karena merasa telah cukup lama terpinggirkan, ter subordinasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi, lewat gerakan yang dinamakan Rakyat Sasak Menggugat. Target pertama dan utama gerakan ini adalah pimpinan daerah Tk. I dari putra daerah (orang Sasak), (2) Munculnya arogansi sikap dan perilaku anggota Ormas Pam Swakarsa tertentu (Amphibi) dalam menangani masalah dengan melampaui batas-batas tugas dan wewenang yang seharusnya, mengakibatkan meruncingnya konflik antar etnis di daerah ini (khususnya dengan etnis Bali). Kasus ini terjadi pada tgl. 17 Desember 1999, bermula dari datangnya sekitar 100 orang anggota Pam Swakarsa Amphibi Lombok Tengah ke pemukiman orang Bali di Mataram Lombok Barat untuk menangkap salah seorang warga Hindu yang dicurigai sebagai pencuri ternak di Lombok Tengah. Dalam pertemuan itu, tertuduh menyangkal bahwa dirinya sebagai pelaku pencurian dan menolak untuk diajak ke pihak berwajib.

Karena kurang terkendalinya emosi, akhirnya terjadilah tindak kekerasan, yang mengakibatkan satu orang meninggal, dan satu orang cacat seumur hidup karena kedua tangannya putus ditebas massa. Selain itu beberapa rumah warga Hindu sempat di rusak. Kasus ini hingga kini belum diselesaikan baik secara kekeluargaan maupun secara hukum dan (3) Munculnya wacana dan gerakan baru dari kelompok etnis Sumbawa dan Bima untuk menjadi satu propinsi yang terpisah dari Mataram. Yang dipakai dasar pemikiran adalah selain karena Sumbawa punya sumber daya alam yang memadai, juga secara historis sebelumnya pusat pelayaran dan perdagangan justru ada di daerah Sumbawa. Dalam konteks ini semangat reformasi dan otonomi daerah, juga telah menumbuhkan sentimen kedaerahan yang berlebihan yang pada gilirannya memperbanyak potensi konflik baru diantara etnis yang berinteraksi baik pada tataran masyarakat biasa maupun di tingkat birokrasi.

Dalam tataran masyarakat bawah konflik lebih banyak terjadi antara etnis Bali dengan etnis Sasak dan Sumbawa yang disebabkan oleh faktor dendam sejarah dan perbedaan agama dan budaya serta kesenjangan ekonomi. Sedangkan ditingkat birokrasi konflik terjadi antara orang Sasak dengan orang Jawa dan Bima dengan Cina, karena faktor struktural (perebutan jabatan struktural strategis dan akses pada aspek sosial politik dan ekonomi). Dengan demikian polarisasi konflik di NTB menggambarkan pola konflik antara etnis Bali dengan etnis Sasak dan Sumbawa dan antara etnis Sasak dengan etnis Jawa, Bima dan Cina. Dan munculnya gerakan Rakyat Sasak Menggugat salah satunya adalah dimaksudkan untuk merebut kembali akses-akses tersebut yang selama kurun waktu lama terpinggirkan dan tersubordinasi etnis lain.

Konflik sosial mataram

Sejarah Lombok mencatat bahwa penguasaan kerajaan Karangasem Bali atas pulau Lombok pada permulaan abad 18 dan kehadiran kolonial Belanda di Lombok hingga 1942 dapat dianggap sebagai masa terjadinya perkembangan-perkembangan baru, terutama dalam masalah hubungan antar etnis dan pengaruh pendidikan modern. Selama periode tersebut terjadi perubahan-perubahan mendasar terutama dalam bidang sosial, politik dan budaya (Budartha 1990:4).

Selama penguasaan kerajaan Karangasem Bali atas Lombok, banyak orang Bali yang datang atau didatangkan ke Lombok untuk bekerja di sektor tertentu dan untuk mengisi jabatan-jabatan penting dalam struktur pemerintahan dari tingkat atas sampai ke tingkat paling bawah (desa). Kehadiran kolonial Belanda beserta pengaruhnya, dan imigran-imigran dari etnis lain (Cina, Bima, Sumbawa dan Jawa) pada periode berikutnya telah menjadikan masyarakat Lombok menjadi masyarakat majemuk, yang sarat dengan potensi konflik bernuansa SARA.

Konflik-konflik sosial yang tercatat pernah terjadi sebelum tragedi Mataram antara lain, pemberontakan Praya terhadap penguasa Bali pada tahun 1837, dan tahun 1891-1894, yang

dianggap kafir dan berlaku sewenang-wenang dalam pengenaan pajak kepada masyarakat Sasak (Budartha 1990:4-5). konflik antar etnik Sumbawa dan Bali di Sumbawa yang terjadi pada tgl. 17-19 Agustus 1980, yang mengakibatkan 11 orang Bali meninggal dan puluhan rumah, Hotel, pasilitas umum dan tempat ibadah (Pura) dibakar. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya konflik sosial tersebut adalah faktor kesenjangan ekonomi, akses politik dan faktor perbedaan budaya dan adat istiadat (Wirawan 1999: 87-91).

Selain konflik sosial yang bernuansa SARA yang berskala besar seperti di atas, konflik antarindividu yang berbeda latar etnis dan pada gilirannya juga melibatkan warga yang lebih besar kerap terjadi, khususnya antara orang Bali (Hindu) dengan orang Sasak. Kasus 17 Desember 1999, seperti telah disinggung di atas, merupakan peristiwa yang sarat dengan muatan sentimen etnis, dimana orang Hindu yang menjadi korbannya. Sebaliknya pada tgl. 4 April 2000 juga telah terjadi perselisihan antar warga Hindu dengan warga Islam (peristiwa Taliwang), dimana dua buah restoran milik orang Islam dibakar oleh orang Hindu, karena mereka membuka restorannya pada hari Raya Nyepi, dan adanya sedikit kesalahpahaman antara Pecalang (petugas adat) dengan warga setempat. Tindakan pembakaran itu dilakukan karena pemilik restoran dianggap tidak toleran dan menghargai perayaan hari Nyepi yang dilaksanakan umat Hindu. Sebaliknya pihak korban menganggap bahwa orang Bali (pecalang) pada saat itu terlalu *over acting* dan arogan dalam melaksanakan pengamanan dan penertiban ibadah penyepian di wilayah kejadian. Tidak tuntasnya penyelesaian kasus-kasus konflik yang terjadi di Lombok selama ini, menimbulkan semakin kuatnya sentimen, persaingan dan konflik di antara suku ini.

Kota Mataram yang berpenduduk sekitar 400 ribu jiwa, yang terdiri dari 80 % beragama Islam, 15 % Hindu dan sisanya mewakili agama lain, selama ini dianggap sebagai wilayah yang aman dan damai, tiba-tiba rusuh, padahal tanda-tanda akan ada kerusuhan tidak dirasakan sebelumnya oleh sebagian masyarakat, kecuali oleh beberapa orang Nasrani yang kebetulan mendapat teror lewat telepon bahwa rumah mereka akan dibakar. Karena itu mereka harus segera mengungsi. Namun teror tersebut tidak direspon oleh penerima telepon.

Kronologis tragedi Mataram, berawal adanya Tablig Akbar yang bertajuk Aksi Solidaritas Untuk Muslim Ambon, yang dilakukan di lapangan Umum Kodya Mataram yang dihadiri oleh sekitar 6000 umat islam dari kota maupun dari luar kota termasuk dari Loteng dan Lotim. Acara sambutan diisi dengan informasi tentang kondisi umat islam di Ambon. Selanjutnya beberapa orasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama dan politik cenderung mengarah pada pertentangan agama, dan akhirnya menyulut emosi massa. Setelah Tabligh Akbar selesai sekitar pukul 10 pagi, akumulasi massa semakin banyak dan tidak terkendali dan akhirnya kerusuhan mataram Meledak. Tragedi Mataram yang berlangsung selama 3 hari dari tgl. 17-19, dimulai dengan pembakaran Gereja, hari

pertama, pembakaran rumah kaum Nasrani hari kedua dan penjarahan toko-toko milik orang Cina pada hari ketiga. Dalam tragedi ini korban yang dapat diidentifikasi yakni : 5 orang tewas, 16 luka-luka, 10 gereja dan 1 buah rumah sakit hangus terbakar. Selain itu puluhan rumah juga mengalami kerusakan.

Mencermati peristiwa kerusuhan Mataram 17-19 Januari 2000, yang melibatkan kelompok Islam (Sasak) dengan kelompok Nasrani (Cina), jika dilihat dari proses sejarah maupun struktur masalahnya, bukanlah disebabkan oleh faktor murni konflik agama, melainkan lebih merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat (etnis Sasak) terhadap keterpurukan dan keterpinggiran mereka dalam berbagai aspek kehidupan (politik, ekonomi, sejarah dan budaya), dan kurang tanggapnya pemerintah dalam mengatai krisis dan kesenjangan ekonomi yang dialami masyarakat. Sasak. Di samping itu semangat reformasi dan otonomi daerah serta berita kerusuhan Ambon, yang direspons berlebihan, membangkitkan kesadaran etnis (*ethnic conciousness*) dan kesetiakawanan etnis (*ethnically based solidarity*), dijadikan instrumen oleh kaum elit lokal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan memang harus diakui, bahwa munculnya kerusuhan Mataram itu dipicu oleh adanya perang antara warga Muslim dengan Kristen di Ambon.

Beranjak dari dua kasus peristiwa di atas dapat dijadikan indikasi bahwa pemahaman dan kesadaran kelompok masyarakat di NTB tentang makna otonomi, demokrasi, toleransi dan masalah HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pluralis, masih sangat rendah. Dan jika kondisi yang demikian tidak ditangani secara arif, komprehensif, dan segera, dikhawatirkan kerusuhan-kerusuhan baru yang bernuansa SARA akan terulang kembali.

Kesimpulan dan saran

Munculnya konflik sosial Mataram merupakan akumulasi kekecewaan akan kondisi tertekan yang dialami etnis Sasak yang telah cukup lama terpinggirkan dan ter subordinasi suku lain dalam bidang ekonomi, budaya dan politik. Gelombang reformasi dan otonomi daerah yang direspons berlebihan oleh masyarakat Sasak merupakan faktor antara yang penting terjadinya kerusuhan Mataram. Selain itu masih erat kaitannya dengan isu otonomi daerah, bahwa munculnya kerusuhan Mataram merupakan bagian skenario dan konspirasi lawan politik Gubernur dan Walikota Mataram terpilih, dengan menjadikan isu agama dan etnisitas sebagai instrumen dalam mencapai tujuan. Kehadiran provokator yang bergerak dalam memobilisasi massa tidak dipungkiri juga memegang andil besar dalam memperluas jangkauan kerusuhan. Dengan demikian konflik sosial Mataram yang melibatkan kelompok Islam Sasak dengan kelompok Nasrani bukan disebabkan murni karena pertentangan agama, melainkan lebih merupakan akibat dari akumulasi konflik-konflik (sosial, ekonomi, politik dan budaya) yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah secara tuntas.

Dengan mengacu pada permasalahan yang ada di NTB tersebut diatas maka disarankan agar pemerintah segera

mensosialisasikan program otonomi daerah ke masyarakat sampai ketingkat paling bawah terutama berkenaan dengan aspek substansinya yang menyangkut tentang masalah demokrasi, keterbukaan, partisipasi, dan HAM dalam tatanan negara kesatuan. Perlu dilakukan berbagai kebijakan yang mampu menumbuhkembangkan sikap-sikap yang menghargai perbedaan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Dalam konteks kebangsaan perlu dikembangkan etnisitas yang mampu membangun solidaritas dan identifikasi diantara orang-orang yang memiliki cita-cita bersama tanpa menindas dan menyingkirkan atau mengabaikan etnisitas lain yang minoritas. Dengan demikian etnisitas tidak dipandang sebagai sesuatu yang statis dan diwariskan dengan label yang spesifik, melainkan harus dilihat sebagai proses yang bersifat pluralistik dan berdimensi majemuk.

Kepustakaan

- Barth Fredrick
1988 *Kelompok Etnik dan Batasannya*, UI Press.
- Bachtiar, Harsja W.
1987 'Integrasi Nasional Indonesia', dalam *Wawasan Kebangsaan Indonesia*, Jakarta, Bakom PKB Pusat.
- Budartha, I B.
1989 *Pertentangan Etnis di Lombok 1891-1942*. Tesis Magister Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada. Tidak diterbitkan.
- Budiman, Maneke
1999 'Jati diri Budaya dalam Proses "Nation Building" di Indonesia, Mengubah Kendala. Menjadi Aset, dalam *Wacana*'. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*. Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Geeertz Clifford
1992 *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta, Kanisius
Tafsir Kebudayaan. Yogyakarta, Kanisius.
- Horowitz L D.
1985 *Ethnic Groups in Conflict*. University of California Press.
- Isaact, Harold R.
1993 *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis, Identitas Kelompok dan Perubahan Politik*. Yayasan Obor Indonesia.
- Nusjirwan, Jenifer
1994 *Pengalaman Lintas Budaya, dalam Komunikasi Antarbudaya*. Mulyana Dedy (ed). PT. Remaja Rasdakarya-Bandung.
- Renan, E.
1990 'What is a Nation', Terj. (Inggris) M. Thom, dalam H. Bhabha (ed), *Nation and Naration*, London: Routedge, h 8-22.

Sanderson K S.

- 1993 *Sosiologi Makro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Jakarta, CV Rajawali Press.

Suparlan, P.

- 1999 'Konflik sosial dan alternatif pemecahannya', dalam *Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology*, th xxiii, No. 59, Mei-Agustus 1999.

Wirawan Bagus A.A.

- 1999 'Inter-Ethnic Conflict in Sumbawa', dalam *Sama-Sama Facets of Ethnic Relations. In South East Asia*. Mariam Coronel Ferer (eds), Quezon City: Third World Studies Center Palma Hall Basement, University of the Philippines.